

DILEMA DIPLOMATIK INDONESIA: NORMALISASI ISRAEL DAN AKSESI OECD DALAM *TWO-LEVEL GAMES*

*Muhammad Hasan Izzurrahman¹ & Prayetno²
^{1,2} Universitas Negeri Medan, Indonesia
*Email Korespondensi: hasanizzur@unimed.ac.id

Abstract

Indonesia faces a complex diplomatic dilemma between its commitment to Palestine and demands to normalize relations with Israel as a condition for joining the OECD. This study uses Robert Putnam's Two-Level Games theory to analyze how Indonesia balances pro-Palestinian domestic interests with international demands regarding relations with Israel. The approach used is qualitative with a literature study, where data is collected through scientific articles, official reports, and related news. The data analysis process is carried out using a three-stage coding technique, namely open coding, axial coding, and selective coding, to identify the main themes and build categories relevant to Indonesia's diplomatic dilemma. The findings show that at level I, Indonesia faces pressure to normalize relations with Israel as a condition for accession to the OECD. Meanwhile, at level II, Indonesia must manage domestic interests that strongly support Palestine, while considering the impact on domestic political stability. Nevertheless, Indonesia maintains its principled position on Palestine, despite the significant opportunities that accession to the OECD could bring in terms of boosting Indonesia's economy, increased investment, and global influence.

Keywords: *diplomatic dilemma, Two-Level Games, OECD accession, normalization with Israel*

PENDAHULUAN

Indonesia berada di persimpangan jalan antara komitmennya terhadap kemerdekaan Palestina dan ambisinya untuk bergabung dengan *the Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD). Keputusan ini mencuat seiring dengan proses aksesinya Indonesia yang hampir memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota OECD, menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sekitar 90% persyaratan telah terpenuhi untuk bergabung dengan organisasi tersebut (Firdausya, 2025), dan akan memenuhi semua persyaratan pada tahun 2027 (Setkab, 2024). Di satu sisi, dalam berita *The Jerusalem Post* yang diterbitkan pada April 2024, mengungkapkan bahwa untuk memastikan keanggotaan Indonesia di OECD, Israel menginginkan normalisasi hubungan dengan Israel sebagai bagian dari persyaratan. Menteri Luar Negeri Israel periode 2024, Israel Katz, bahkan menegaskan bahwa Israel akan menentang aksesinya Indonesia jika negara tersebut tidak menunjukkan itikad untuk melakukan normalisasi (Lazaroff, 2024).

Kondisi pertama, politik domestik Indonesia sangat pro-Palestina, berakar pada prinsip dasar negara yang terkandung dalam UUD 1945 dan peran penting Indonesia dalam Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 yang secara tegas menentang segala bentuk penjajahan. Sementara di kondisi lainnya, Indonesia dihadapkan pada peluang besar yang ditawarkan oleh keanggotaan OECD, yang dapat membuka pintu bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, serta pengaruh politik Indonesia di kancah global. Israel, sebagai anggota OECD, menjadi salah satu negara yang memegang pengaruh

dalam proses aksesi ini. Oleh karena itu, Indonesia perlu menyeimbangkan kepentingan domestiknya dengan kebutuhan internasional, terutama menyangkut upaya normalisasi hubungan dengan Israel yang menjadi syarat penting untuk bergabung dengan OECD.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya untuk menjawab persoalan bagaimana Indonesia dapat menyeimbangkan komitmennya terhadap Palestina dengan tuntutan Israel untuk normalisasi hubungan sebagai syarat bergabung dengan OECD. Untuk menganalisis ini, digunakan teori *Two-Level Games* yang dikembangkan oleh Robert Putnam (1988). Teori ini muncul dari kesadaran bahwa kebijakan luar negeri tidak bisa dilepaskan dari konteks politik domestik. Putnam menyoroti bahwa negosiasi internasional bukanlah proses yang steril dari tarik-menarik kekuasaan di dalam negeri. Putnam mengkritik pendekatan tradisional dalam studi hubungan internasional yang cenderung memisahkan urusan luar negeri dari dinamika internal negara. Menurut Putnam, realitas politik menunjukkan bahwa pemimpin negara bernegosiasi dengan dua audiens sekaligus—mitra asing dan konstituen domestik (Putnam, 1988).

Dalam kerangka ini, setiap proses negosiasi internasional berlangsung di dua arena yang saling terkait. Arena pertama (Level I) adalah meja perundingan antarnegara, tempat para negosiator berusaha mencapai kesepakatan. Namun kesepakatan ini tidak akan berarti jika tidak disetujui oleh aktor-aktor domestik di arena kedua (Level II), seperti parlemen, partai politik, kelompok bisnis, serikat pekerja, atau bahkan opini publik. Di sinilah kompleksitas muncul: keberhasilan diplomasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan negosiator menjalin kompromi di Level I, tetapi juga oleh kemampuannya menjual kesepakatan itu kepada konstituen di Level II. Dengan kata lain, diplomasi bukan sekadar persoalan antarnegara, melainkan juga soal legitimasi dan politik dalam negeri (Putnam, 1988).

Indonesia terjebak dalam dua permainan yang saling bertentangan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika diplomatik Indonesia dalam menghadapi dilema besar antara kepentingan domestik yang mendukung Palestina dan tuntutan Israel sebagai syarat bergabung dengan OECD. Melalui penggunaan teori Putnam (1988), penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peran politik domestik dalam mempengaruhi keputusan luar negeri, serta tantangan yang dihadapi oleh negara-negara yang terjebak dalam dua permainan yang saling bertentangan. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam diskursus akademis mengenai hubungan antara politik domestik dan internasional dalam kebijakan luar negeri, khususnya untuk negara-negara yang memiliki posisi diplomatik yang kuat dalam isu tertentu, seperti Indonesia dalam hal Palestina.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menganalisis dinamika hubungan antara politik domestik dan tekanan internasional terhadap Indonesia. Sumber data utama yang digunakan meliputi artikel ilmiah, laporan resmi OECD, laporan maupun kertas kebijakan dari lembaga-lembaga nasional dan internasional, serta laporan pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan proses aksesi Indonesia ke OECD. Selain itu, berita-berita yang relevan dengan isu Palestina, Israel, dan OECD akan dijadikan sebagai bahan untuk menggali bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia dipengaruhi oleh interaksi antara politik domestik dan tekanan internasional.

Proses analisis data akan dilakukan dengan teknik pengkodean yang merujuk pada praktik analisis data kualitatif. Merujuk dari Bazeley (2013), pengkodean dilakukan melalui tiga tahap. Pertama tahapan *open coding*, data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan mengidentifikasi dan memberi label pada bagian-bagian penting dari teks yang berkaitan dengan tema-tema utama, seperti "komitmen terhadap kemerdekaan Palestina", "desakan internasional", dan "realitas politik domestik". Selanjutnya, pada tahap *axial coding*, kode-kode yang telah diidentifikasi akan dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang lebih besar yang mencerminkan dilema diplomatik yang dihadapi Indonesia. Terakhir, pada tahap *selective coding*, peneliti akan memilih kategori utama yang paling relevan dengan tujuan penelitian dan merumuskan kesimpulan serta interpretasi berdasarkan kategori-kategori tersebut. Data yang telah dikelompokkan akan diintegrasikan dengan kerangka teori *Two-Level Games* untuk mengidentifikasi dan menjelaskan permasalahan diplomatik yang dihadapi Indonesia terkait dengan kebijakan luar negerinya. Kemudian, validitas data akan dijaga dengan triangulasi antara berbagai sumber yang berbeda, serta verifikasi melalui pemeriksaan konsistensi dan kredibilitas informasi yang diperoleh.

PEMBAHASAN

Level I: Proses Akses ke OECD

OECD dibentuk pada tahun 1961 sebagai kelanjutan dari *Organization for European Economic Co-operation* (OEEC), yang sebelumnya didirikan untuk membantu rekonstruksi Eropa setelah Perang Dunia II. Pada 14 Desember 1960, 18 negara anggota OEEC, bersama dengan Amerika Serikat dan Kanada, menandatangani konvensi yang mengubah OEEC menjadi OECD, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial melalui kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sejak itu, OECD telah menjadi perkumpulan negara-negara maju dengan tingkat Indeks Pembangunan Manusia yang sangat tinggi, bertujuan untuk menciptakan kebijakan dan standar internasional dalam berbagai sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Pada tahun 2004, di bawah kepemimpinan Jepang, OECD mengeluarkan *Noboru Report*, yang menetapkan empat kriteria untuk menilai negara kandidat dalam proses akses: kesamaan nilai (*like-mindedness*), peran signifikan di tingkat global (*significant player*), manfaat bersama (*mutual benefit*), dan pertimbangan global (*global considerations*) (Hutabarat et al., 2023).

Pada 25 Januari 2022, OECD melebarkan cakupannya dengan membuka diskusi akses dengan enam negara kandidat, yaitu Argentina, Brazil, Bulgaria, Kroasia, Peru, dan Romania. Semua negara tersebut, kecuali Argentina, telah menerima *Accession Roadmap* pada 10 Juni 2022 (OECD, 2023). OECD juga melihat lima negara *key partners*—Brazil, China, India, Indonesia, dan Afrika Selatan—sebagai kandidat potensial karena posisi strategis mereka di kawasan masing-masing, dengan perhatian khusus pada Asia Tenggara (OECD, 2017). Sebagian besar negara anggota OECD termasuk dalam kategori *high-income country*, dengan GNI per kapita minimal USD13.846. Indonesia, yang memiliki GNI per kapita sebesar USD 4.580, termasuk dalam kategori *upper-middle income country*, bersama dengan Kosta Rika, Turki, Meksiko, dan Kolombia, meskipun masih lebih rendah dibandingkan Kolombia yang mencapai USD6.510. Di antara *key partners*, Indonesia hanya unggul dari India yang memiliki GNI per kapita sebesar USD 2.380, tergolong dalam *lower-middle income country* (Hutabarat et al., 2023).

Proses akses ke OECD terdiri dari tiga tahap utama: pra-aksesi, akses, dan pasca-aksesi. Pada tahap pra-aksesi, negara kandidat harus mengajukan ekspresi minat melalui surat resmi kepada Sekjen OECD, diikuti dengan evaluasi awal yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal OECD. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap kesiapan negara dalam hal kebijakan ekonomi, kerangka hukum, serta kesesuaian dengan nilai dan standar OECD (Hutabarat et al., 2023). Untuk Indonesia, ekspresi minat telah disampaikan pada Juli 2023, dan pada September 2023, Dewan OECD mulai melakukan evaluasi terhadap proposal akses Indonesia. Setelah ekspresi minat diterima, OECD akan melakukan evaluasi awal terhadap kesiapan Indonesia untuk bergabung dengan organisasi ini. Evaluasi ini akan mencakup penilaian terhadap kebijakan ekonomi, kerangka hukum, dan sejauh mana Indonesia dapat mematuhi nilai-nilai OECD, seperti demokrasi, transparansi, dan tata kelola yang baik. Proses evaluasi ini bersifat politikal dan memerlukan lobi politik tingkat tinggi untuk memastikan Indonesia diterima dalam proses akses (OECD, 2024).

Setelah itu, negara kandidat memasuki tahap akses yang melibatkan beberapa tahapan, termasuk diskusi akses dengan negara-negara anggota OECD dan penyusunan *accession roadmap*. Peta Jalan ini berisi serangkaian rekomendasi dan instrumen hukum yang harus dipenuhi oleh negara kandidat, yang mencakup 271 instrumen hukum OECD, termasuk keputusan, rekomendasi, dan perjanjian internasional (Hutabarat et al., 2023). Negara kandidat harus melakukan reformasi hukum domestik untuk menyelaraskan kebijakan dan praktiknya dengan standar OECD. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama, dengan banyak komite yang akan melakukan penilaian terhadap kesiapan negara kandidat dalam menerapkan standar tersebut. Pada Februari dan Juni 2024, OECD memulai diskusi akses dengan Indonesia, menjadikannya sebagai anggota ASEAN pertama yang menjadi kandidat akses OECD (Randhawa, 2025).

Setelah *accession roadmap*—telah memenuhi 271 instrumen hukum serta memenuhi standar OECD dalam berbagai bidang, seperti perdagangan terbuka, transparansi, perlindungan lingkungan, dan investasi, serta syarat-syarat dasar lainnya—disetujui, Indonesia harus melakukan *self-assessment* terhadap keselarasan kebijakan domestik dengan standar OECD, yang hasilnya akan dituangkan dalam sebuah *initial memorandum*. Proses ini penting untuk memastikan bahwa Indonesia dapat melakukan reformasi yang diperlukan sesuai dengan rekomendasi dalam *roadmap*. Selain itu, tahap ini juga melibatkan *committee reviews*, di mana komite-komite OECD akan melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan Indonesia, memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan, dan menilai kemampuan Indonesia untuk menerapkan perubahan yang disarankan (OECD, 2024).

Proses *committee reviews* ini adalah salah satu tahap yang paling kompleks dan memakan waktu, karena melibatkan peninjauan kebijakan dan praktik Indonesia oleh 24 hingga 26 komite OECD. Setiap komite akan mengevaluasi apakah kebijakan Indonesia sudah sejajar dengan standar OECD. Berdasarkan hasil evaluasi ini, komite-komite OECD akan mengeluarkan *formal opinion* yang memberikan panduan lebih lanjut mengenai langkah-langkah yang harus diambil Indonesia untuk memperbaiki dan menyempurnakan kebijakannya. Setelah Indonesia menyelesaikan semua tahap reformasi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh OECD, Indonesia akan memasuki tahap ratifikasi dan akses resmi (OECD, 2024). Proses ini berarti Indonesia telah memenuhi semua standar OECD dan resmi menjadi anggota OECD setelah melalui prosedur yang diperlukan (Hutabarat et al., 2023).

Namun, proses tidak berhenti setelah Indonesia menjadi anggota OECD. Negara yang telah diterima sebagai anggota baru akan memasuki tahap pasca-aksesi, di mana Indonesia akan terus melaporkan implementasi instrumen hukum OECD yang belum sepenuhnya tercapai (Hutabarat et al., 2023). Pelaporan pasca-aksesi ini memiliki batas waktu tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemajuan reformasi yang dilakukan Indonesia, memastikan bahwa Indonesia tetap mematuhi standar yang ditetapkan dan berperan aktif dalam pengambilan kebijakan global di dalam OECD (OECD, 2024).

Level II: Kepentingan Nasional

Indonesia bertujuan untuk menjadi ekonomi berpendapatan tinggi pada tahun 2045, sebagaimana diuraikan dalam Visi Emas Indonesia 2045. Secara ekonomi, Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan mengurangi kemiskinan dengan pertumbuhan PDB rata-rata antara 5-6% dalam dua dekade terakhir. Namun, antara tahun 2005 hingga 2019, pertumbuhan total faktor produktivitas (TFP) negatif dengan rata-rata -0,7%, tertinggal dari negara-negara besar global seperti Tiongkok dan India, serta dari negara-negara regional seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia (Shandy, Pane, Yuriza, Hasran, et al., 2025). Meskipun stagnan sejak 2011, Indonesia tetap menjadi tujuan utama bagi investasi asing langsung (FDI) di ASEAN, dengan menarik USD22,1 miliar pada 2023, sebagai perbandingan Singapura menarik sebesar USD175,2 miliar. Dalam hal perdagangan, volume total perdagangan Indonesia telah meningkat, tetapi porsi perdagangan global Indonesia tetap rendah—hanya naik dari 0,8% pada 2004 menjadi 1,1% pada 2023 (Shandy, Pane, Yuriza, Gupta, et al., 2025).

Menurut studi *Center for Indonesian Policy Studies* (CIPS) tahun 2025, akses Indonesia ke OECD akan membuka peluang untuk meningkatkan PDB, memperbaiki neraca perdagangan, dan menarik lebih banyak investasi, yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Model CGE memproyeksikan bahwa akses ke OECD akan memberikan dampak positif signifikan bagi Indonesia baik di sektor makroekonomi maupun sektor-sektor tertentu. Dalam skenario di mana Indonesia bergabung dengan OECD, Indonesia diperkirakan akan menerima investasi sebesar USD87,7 miliar pada 2028, yang setara dengan 0,03% dari PDB Indonesia pada tahun tersebut. Sebagian besar dari investasi ini (27%) diperkirakan akan datang dari negara-negara di luar OECD, dengan porsi 25% berasal dari negara-negara OECD (Shandy, Pane, Yuriza, Gupta, et al., 2025).

Dalam hal indikator makroekonomi, tingkat pertumbuhan PDB Indonesia per tahun diperkirakan akan lebih tinggi 0,78 poin persentase dibandingkan skenario dasar pada jangka pendek (2028–2030) dan 0,92 poin persentase lebih tinggi pada jangka menengah (2031–2035). Tren yang sama berlaku untuk pertumbuhan investasi, yang diperkirakan akan lebih tinggi 1,22 poin persentase di jangka pendek (2028–2030), dan 1,78 poin persentase di jangka menengah (2031–2035) (Shandy, Pane, Yuriza, Gupta, et al., 2025). Selama jangka pendek dan menengah, dinamika perdagangan juga akan berkembang. Pada awalnya, meningkatnya FDI dapat memicu lonjakan impor seiring dengan ekspansi dan peningkatan produksi perusahaan (Cahyaningrum, 2023). Namun, ini diperkirakan akan membuka jalan bagi kapasitas domestik yang lebih kuat dan kinerja ekspor yang lebih baik dalam jangka panjang, mendukung integrasi Indonesia yang lebih dalam dalam rantai nilai global. Dalam hal keuangan, partisipasi asing yang lebih besar dalam jangka pendek hingga menengah dapat meningkatkan arus pendapatan keluar, namun seiring waktu, hal ini diperkirakan akan menurun seiring dengan

peningkatan kapasitas lokal dan bertumbuhnya investasi keluar (Shandy, Pane, Yuriza, Gupta, et al., 2025).

Menjadi anggota OECD mengharuskan Indonesia untuk mengadopsi standar global dan menjalani reformasi kebijakan serta regulasi yang komprehensif. Namun, dalam keanggotaan OECD, ditawarkan peluang besar di berbagai sektor, seperti manufaktur, layanan, sumber daya alam, dan transisi energi terbarukan. Di sektor manufaktur, industri yang diperkirakan akan memperoleh manfaat meliputi industri makanan dan agro, logam dasar, kimia dan farmasi, tekstil dan pakaian, otomotif, dan elektronika. Di sektor layanan, sektor pariwisata, transportasi, ICT, dan pendidikan diperkirakan akan mengalami dampak positif. Di sektor industri ekstraktif, pertambangan batubara, gas, dan bijih logam juga diperkirakan akan mengalami perbaikan. Menurut studi *Center for Economic and Law Studies* (CELIOS), keanggotaan OECD akan membentuk praktik terbaik dalam pembangunan berkelanjutan, anti-korupsi, konflik agraria, dan tata kelola bisnis yang bertanggung jawab (Adhinegara et al., 2025).

Dalam perspektif masyarakat sipil, keuntungan Indonesia menjadi anggota OECD memang terlihat jelas, terutama dalam hal peningkatan keaksesibilitas pasar global yang lebih luas dan kemudahan dalam menarik investasi asing. Akses ini berpotensi membawa Indonesia keluar dari *middle-income trap*, mendorong reformasi kebijakan ekonomi, dan mempercepat transisi menuju ekonomi yang lebih kompetitif dengan meningkatkan transfer teknologi dan pengembangan sumber daya manusia. Negara-negara OECD dikenal dengan standar tinggi dalam hal tata kelola, transparansi, dan kualitas hidup, sehingga keanggotaan Indonesia dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan (INFID, 2024).

Interaksi antara Level I dan Level II: Dilema Diplomati Indonesia

Indonesia telah lama memegang komitmen terhadap Palestina dalam kerangka politik luar negerinya. Sejak pengumuman rencana normalisasi hubungan dengan Israel pada April 2024, komitmen tersebut mengalami ujian. Meskipun rencana untuk normalisasi hubungan sempat tertunda akibat konflik Gaza yang dimulai pada 7 Oktober 2023, proses tersebut kemudian dipicu kembali melalui tawaran Indonesia untuk menjadi anggota OECD. Indonesia diharuskan untuk melakukan normalisasi dengan Israel sebagai bagian dari syarat keanggotaan, sebuah keputusan yang didorong oleh Israel melalui Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz. Dalam konteks ini, Israel secara tegas menyatakan bahwa hubungan diplomatik dengan Israel adalah prasyarat bagi keanggotaan Indonesia dalam OECD, dan ini dinyatakan secara eksplisit dalam surat Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann, pada 26 Maret 2024 (Lazaroff, 2024).

Sebagai mitra kunci OECD, Indonesia telah menunjukkan komitmen yang signifikan sejak menjadi partner pada tahun 2007. Pada tahun 2012, Indonesia menandatangani *Framework of Cooperation Agreement* (FCA) dengan OECD untuk jangka waktu lima tahun, yang kemudian diperbaharui pada tahun 2017 dan 2022. Dalam rangka meningkatkan hubungan ini, Indonesia juga telah menyetujui empat *Joint Work Programme* (JWP) pada periode 2015-2025, yang mendukung implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 serta upaya pemulihan berkelanjutan pasca-pandemi COVID-19. Hingga saat ini, Indonesia telah mengakses 12 instrumen OECD dan menjadi anggota OECD *Development Centre* serta berkontribusi pada pembentukan OECD *Southeast Asia Regional Programme* pada tahun 2014. Meski demikian, Indonesia

masih perlu menyesuaikan banyak instrumen OECD dengan kondisi domestik yang ada (Hutabarat et al., 2023).

Proses akses Indonesia ke OECD telah memunculkan berbagai dukungan internasional yang penting. Pada pertemuan Dewan OECD pada 13 September 2023 di Paris, tidak ada negara anggota yang mengajukan keberatan terhadap rencana akses Indonesia, dengan dukungan kuat dari Korea Selatan, Jepang, Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Turki. Jerman dan Prancis juga menyatakan komitmen mendukung proses tersebut. Meski demikian, beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, Finlandia, dan Spanyol, memberikan catatan terhadap proses akses ini. Amerika Serikat mengindikasikan perlunya waktu untuk membahas rencana ini dengan lembaga-lembaga terkait, sementara Finlandia khawatir akan mempengaruhi proses akses negara lain. Spanyol menekankan bahwa proses akses memerlukan waktu yang lebih lama dan tidak dapat dipercepat. Kantor Regional OECD di Jakarta juga menegaskan bahwa keputusan final mengenai akses Indonesia kemungkinan akan dibahas kembali pada pertemuan Dewan OECD pada Desember 2023 atau Januari 2024 setelah memperoleh dukungan penuh dari seluruh anggota OECD (Hutabarat et al., 2023).

Pada Februari 2024, Dewan OECD secara resmi membuka pembicaraan mengenai akses Indonesia yang melibatkan dukungan penuh dari 38 negara anggota, termasuk Israel. Kemudian pada 29 Maret 2024, Dewan OECD menyetujui *roadmap* akses Indonesia, meskipun Israel berupaya menghalangi akses Indonesia karena ketiadaan hubungan diplomatik resmi (Rachman, 2025). Indonesia, yang selama ini mengedepankan solidaritas dengan Palestina, telah lama menolak untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Namun, seiring dengan ambisi Indonesia untuk bergabung dengan OECD dan meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara-negara Barat, muncul pertanyaan apakah Indonesia harus mengorbankan komitmennya terhadap hak-hak Palestina demi keuntungan politik dan ekonomi dari keanggotaan OECD.

Normalisasi hubungan Indonesia dengan Israel bukanlah isu baru dalam politik luar negeri Indonesia. Sebelumnya, pada era Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001), Indonesia sempat mempertimbangkan untuk membuka jalur perdagangan dengan Israel, dengan alasan Indonesia tidak dapat memainkan peran dalam negosiasi damai Palestina-Israel tanpa hubungan diplomatik dengan kedua belah pihak. Meskipun demikian, sikap Indonesia terhadap Palestina tetap menjadi bagian integral dari identitas politik luar negeri Indonesia. Indonesia terus mendukung hak-hak Palestina, sebuah posisi yang telah lama dipegang sejak era Soekarno dan secara konsisten menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia (Utama, 2024).

Sementara itu, sebagai bagian dari dinamika hubungan dagang tidak resmi Indonesia-Israel, ekspor Indonesia ke Israel terus menunjukkan tren peningkatan. Menurut data dari Badan Statistik (BPS) yang dipublikasikan pada Agustus 2024, tercatat nilai ekspor per Juli 2024 mencapai USD16,247 juta, naik 1,86% dibandingkan laporan Juni 2024. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, lonjakan ekspor Indonesia ke Israel mencapai 21,39%. Secara akumulatif, nilai ekspor sepanjang Januari hingga Juli 2024 berjumlah USD98,539 juta. Komoditas utama yang diekspor antara lain lemak dan minyak hewan/nabati, produk kimia, dan alas kaki (Yanwardhana, 2024). Meskipun demikian, angka ini masih tergolong kecil dibandingkan dengan total perdagangan internasional Indonesia, di mana negara tujuan ekspor terbesar Indonesia adalah Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, India, dan negara-negara ASEAN.

Namun, di tengah upaya akses ke OECD, Indonesia menghadapi risiko domestik yang signifikan. Publik Indonesia, yang mayoritas masyarakatnya mendukung Palestina, kemungkinan besar akan menentang normalisasi hubungan dengan Israel, terutama mengingat situasi genosida yang terjadi di Gaza. Proses normalisasi ini berpotensi menimbulkan protes besar dan ketidakstabilan politik domestik. Jika pemerintah Indonesia melanjutkan upaya ini tanpa kemajuan yang signifikan dalam proses perdamaian Palestina, hal ini bisa memperburuk polarisasi politik di dalam negeri, memicu ketegangan antara pragmatis yang mendukung hubungan internasional dan idealis yang berpegang teguh pada solidaritas dengan Palestina (Rakhmat, 2025).

Lebih jauh lagi, langkah normalisasi ini juga dapat merusak posisi diplomatik Indonesia di kancah internasional. Sejak kemerdekaannya, Indonesia telah dikenal sebagai negara yang mengadvokasi keadilan global dan memperjuangkan hak-hak bangsa terjajah melalui berbagai platform, termasuk Konferensi Asia-Afrika dan Gerakan Non-Blok. Oleh karena itu, normalisasi hubungan dengan Israel tanpa penyelesaian yang adil bagi Palestina dapat dilihat sebagai pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip anti-kolonialisme yang selama ini menjadi landasan kebijakan luar negeri Indonesia. Hal ini berpotensi melemahkan posisi Indonesia di mata negara-negara berkembang dan mengurangi pengaruhnya di kawasan *Global South*.

Reaksi dan posisi pemerintahan Indonesia turut dimasukkan ke dalam kategori pengkodean. Pada Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dengan syarat pengakuan negara Palestina oleh Israel. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers bersama Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang turut mengangkat masalah krisis Gaza. Meskipun kebijakan ini menarik perhatian internasional, tidak ada perubahan nyata dalam kebijakan luar negeri Indonesia yang telah lama mendukung solusi dua negara (*two-state solution*) untuk konflik Israel-Palestina (Strangio, 2025). Namun, pernyataan Prabowo tersebut memperlihatkan sikap pragmatis dalam kebijakan luar negeri Indonesia yang bertujuan memperkuat posisi negara di kancah internasional dan meningkatkan ekonomi serta investasi dengan bergabung ke OECD. Pada saat yang sama, Indonesia tidak mengubah posisi moralnya terhadap Palestina, meskipun terdapat tekanan dari beberapa negara anggota OECD, termasuk Israel, untuk normalisasi hubungan sebagai bagian dari proses akses.

Kemudian sikap dan posisi tersebut diturunkan dari presiden kepada jajaran pemerintahan, seperti halnya Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional pada Mei 2024 dengan menegaskan bahwa Indonesia menolak tegas syarat tersebut, mengingat posisi Indonesia yang konsisten mendukung Palestina. Dalam hal ini, meskipun pengambilan keputusan dalam OECD membutuhkan konsensus dari negara-negara anggota, termasuk Israel, Indonesia tetap mempertahankan sikap prinsipil terhadap Palestina, yang juga didukung oleh mayoritas masyarakat Indonesia (Azzahra, 2024). Terlepas ada harapan agar Dewan OECD dapat mempertimbangkan nilai dan visi yang lebih luas dalam proses akses ini persyaratannya pengakuan Israel jika berhenti menyerang Gaza dan menunjukkan komitmen pada solusi dua negara yang ditekankan oleh dunia internasional.

Dalam perkembangan lebih lanjut, Kementerian Luar Negeri Indonesia juga menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu merisaukan kemungkinan veto dari Israel terkait akses ke OECD. Kementerian menjelaskan bahwa proses akses Indonesia masih panjang dan Indonesia telah menerima *roadmap* untuk akses tersebut pada Mei 2024. Kementerian juga menyatakan bahwa Indonesia sedang melakukan penilaian mandiri untuk menyesuaikan regulasi domestik dengan standar OECD, yang

melibatkan penilaian lebih dari 250 standar yang harus dipenuhi. Terlepas juga ada harapan bahwa dalam jangka waktu tiga hingga lima tahun ke depan, Israel dapat menerima solusi dua negara yang memungkinkan Palestina menjadi negara merdeka, yang akan mengurangi kemungkinan masalah terkait pengakuan Indonesia di OECD (Ulya, 2024).

Penting untuk dicatat bahwa meskipun Indonesia telah mendapatkan dukungan dari mayoritas negara anggota OECD, proses akses ini tidak dapat dipandang sebagai proses yang cepat dan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara-negara akses lainnya seperti Brasil dan Chile yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan proses serupa. Dengan demikian, meskipun tantangan besar tetap ada, Indonesia berharap dengan menjaga posisi yang konsisten, proses akses ini dapat berlangsung tanpa merusak prinsip-prinsip luar negeri Indonesia yang mendukung Palestina.

PENUTUP

Indonesia menghadapi dilema diplomatik antara komitmennya terhadap kemerdekaan Palestina dan tuntutan Israel untuk menormalisasi hubungan demi bergabung dengan OECD. Menggunakan teori *Two-Level Games*, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dipengaruhi oleh interaksi antara politik domestik yang pro-Palestina dan tekanan Internasional, khususnya Israel yang mendesak normalisasi hubungan diplomatik. Indonesia terus berupaya menyeimbangkan kedua arena tersebut, yaitu kepentingan nasional, realitas politik domestik, dan tuntutan antarnegara yang ketiganya saling bertentangan. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun Indonesia menghadapi tekanan dari luar, posisi politik luar negeri yang mendukung kemerdekaan Palestina tetap menjadi prinsip yang kuat, meskipun di satu sisi cenderung pragmatis karena ada peluang strategis atas kepentingan nasional. Proses akses Indonesia ke OECD menawarkan potensi besar dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan pengaruh global, namun juga membawa tantangan diplomatik yang harus ditangani dengan hati-hati. Sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, fokus dapat diberikan pada penerapan strategi diplomatik yang lebih mendalam, seperti *win-rate* dalam lanjutan teori *Two-Level Games*, untuk memahami bagaimana negara-negara dalam posisi serupa dapat mengelola dua arena politik yang saling mempengaruhi. Penelitian lebih lanjut juga diharapkan dapat mengeksplorasi dampak dari normalisasi hubungan dengan Israel terhadap stabilitas politik domestik serta posisi diplomatik Indonesia di tingkat internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto, 2001. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas* Adhinegara, B. Y., Widyaningsih, G. A., Saleh, M., Andrian, S. R. A., & Syaharani. (2025). *Indonesia's Accession to the OECD*. https://icel.or.id/media/pdf/ICEL-Indonesias-Accession-to-the-OECD_.pdf
- Azzahra, Q. (2024). *Indonesia Tolak Tegas Syarat Akui Israel untuk Jadi Anggota OECD*. Tirto. <https://tirto.id/indonesia-tolak-tegas-syarat-akui-israel-untuk-jadi-anggota-oecd-gZai>
- Bazeley, P. (2013). *Qualitative Data Analysis: Practical Strategies*. Sage Publications.
- Cahyaningrum, D. (2023). *Akselerasi keanggotaan penuh indonesia di OECD* (Isu Sepekan Bidang

- Ekkuibang Komisi VI). [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu Sepekan--I-PUSLIT-November-2023-191.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan--I-PUSLIT-November-2023-191.pdf)
- Firdausya, I. (2025). *Indonesia Sudah Penuhi 90% Persyaratan Masuk OECD*. Metro TV. <https://www.metrotvnews.com/read/ba4CzQDO-indonesia-sudah-penuhi-90-persyaratan-masuk-oecd>
- Hutabarat, L. F., Nugraha, L., Syahid, M., Kuntarto, A., Rahma, Y., Priyantari, Ayu, H. L. P., Resnadiasa, G., Galuh Octania Permatasari, & Helmys, N. (2023). *Aksesi Indonesia ke OECD: Reviu Strategis Geopolitik, Geokonomi, dan Implikasinya*. <http://repository.uki.ac.id/18361/1/AksesiIndonesiakeOECD.pdf>
- INFID. (2024). *Bunga Rampai: Mengkaji Aksesi Indonesia Menuju Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam Perspektif Masyarakat Sipil (Bunga Rampai)*. https://infid.org/wp-content/uploads/2024/07/Bunga-Rampai_-Mengkaji-Aksesi-Indonesia-Menuju-OECD-dalam-Perspektif-Masyarakat-Sipil-NAME.pdf
- Lazaroff, T. (2024). *Indonesia to normalize ties with Israel amid OECD membership bid*. The Jerusalem Post. <https://www.jpost.com/israel-hamas-war/article-796514>
- OECD. (2017). *Report of the Chair of the Working Group on the Future Size and Membership of the Organisation to Council at the Meeting of the OECD Council at Ministerial Level, Paris, 7-8 June 2017 and the Framework for the Consideration of Prospective Members*. [https://one.oecd.org/document/C\(2017\)50/FINAL/en/pdf](https://one.oecd.org/document/C(2017)50/FINAL/en/pdf)
- OECD. (2023). *Convention on the OECD*. <https://www.oecd.org/en/about/legal.html>
- OECD. (2024). *Roadmap for the OECD Accession Process of Indonesia*. [https://one.oecd.org/document/C\(2024\)66/FINAL/en/pdf](https://one.oecd.org/document/C(2024)66/FINAL/en/pdf)
- Putnam, R. D. (1988). *Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games*. *International Organization*, 42(3), 427-460. <http://links.jstor.org/sici?sici=0020-818328198822%2942%3A3%3C427%3ADADPTL%3E2.O.CO%3B2-K>
- Rachman, M. F. (2025). *Ada Faktor OECD di Balik Isu Perundingan Indonesia-Israel? Ketahui Apa Itu OECD*. Tempo. <https://www.tempo.co/ekonomi/ada-faktor-oecd-di-balik-isu-perundingan-indonesia-israel-ketahui-apa-itu-oecd-1652958>
- Rakhmat, M. Z. (2025). *Indonesia shouldn't trade Palestine for OECD membership*. Middle East Monitor. <https://www.middleeastmonitor.com/20250609-indonesia-shouldnt-trade-palestine-for-oecd-membership/>
- Randhawa, D. S. (2025). *Signalling Policy Credibility : Indonesia and Thailand 's Pursuit of OECD Membership*. *Signalling Policy Credibility: Indonesia and* (Issue July). <https://rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2025/07/CO25144.pdf>
- Setkab. (2024). *Indonesia Seeks to Become OECD Member State by 2027*. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/en/indonesia-seeks-to-become-oecd-member-state-by-2027/>
- Shandy, B., Pane, D., Yuriza, F., Gupta, K., Fadila, L., Dominika, M., Nabila, N., & Bahar, W. (2025). *Indonesia 's Accession to OECD Understanding the Economic Implications* (Issue July). <https://repository.cips-indonesia.org/media/publications/620682-indonesia-s-accession-to->

oecd-understand-2cfedd12.pdf

- Shandy, B., Pane, D., Yuriza, F., Hasran, Gupta, K., Fadila, L., Dominika, M., Nabila, N., & Bahar, W. (2025). *Unlocking Indonesia's Economic Potential Through OECD Accession* (29). <https://repository.cips-indonesia.org/media/publications/619206-unlocking-indonesias-economic-potential-a8d0e8ee.pdf>
- Strangio, S. (2025). *Prabowo Says Indonesia Ready to Establish Diplomatic Ties With Israel – On One Condition*. *The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2025/05/prabowo-says-indonesia-ready-to-establish-diplomatic-ties-with-israel-on-one-condition/>
- Ulya, F. N. (2024). *Kemenlu: Tidak Perlu Spekulasi Keanggotaan OECD Indonesia Akan Diveto Israel*. *Kompas*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/30/17034211/kemenlu-tidak-perlu-spekulasi-keanggotaan-oecd-indonesia-akan-diveto-israel?page=all>
- Utama, V. R. (2024). *Indonesia, Israel and the OECD: What is really going on?* The University of Melbourne. <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/indonesia-israel-and-the-oecd-what-is-really-going-on/>
- Yanwardhana, E. (2024). *Produk Indonesia Ternyata Laku di Israel, Ini Daftarnya*. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240831110346-4-567972/produk-indonesia-ternyata-laku-di-israel-ini-daftarnya#:~:text=Dikutip dari data BPS%2C ekspor,negara Asean%2C%22 ujar dia.>